

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perolehan sertifikat Hak Milik atas tanah (jual beli) telah mewujudkan perlindungan hukum di Kota Samarinda. Semua responden telah mendaftarkan peralihan Hak Milik atas tanahnya dan telah memperoleh sertifikat Hak Milik. Meskipun ada dua responden dalam penelitian ini yang mendapatkan gugatan dari pihak ketiga yang mengakui tanah Hak Miliknya. Responden pertama yang mendapatkan gugatan dari pihak ketiga adalah Bapak Winarto dengan penyelesaian yang dilakukan adalah melalui proses mediasi / kekeluargaan dengan adanya lurah, ketua RT dan tetangga sekitar. Responden kedua yang mendapatkan gugatan dari pihak ketiga adalah Bapak Markus dengan penyelesaian yang dilakukan adalah yang pada mulanya melalui proses mediasi tetapi tidak berhasil dan selanjutnya melalui persidangan dengan memberikan keterangan, saksi dan bukti-bukti. Putusan dalam persidangan itu adalah pelanggaran dan penuntutan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Bapak Markus ternyata telah lewat tenggang waktu satu tahun sehingga Hak untuk menuntut hukuman terhadap Bapak Markus haruslah dinyatakan gugur, namun Pengadilan Negeri mempertimbangkan bahwa jika terdapat pihak-pihak

yang merasa memiliki tanah itu dapat mengajukan gugatan perkara perdata. Dengan diperolehnya sertifikat Hak Milik sebagai hasil dari dilaksanakannya pendaftaran peralihan hak, maka dapat memperkuat posisi dan status kepemilikan terhadap bidang tanah, memberikan rasa aman bagi pemegang Hak Milik atas tanah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat penulis berikan yaitu:

- 1) Bagi masyarakat, sebelum melakukan jual beli tanah seharusnya melihat terlebih dahulu obyek tanah yang bersangkutan, dengan melihat sejarah dari mana status tanah tersebut dan pemilik tanah atau bertanya kepada Kantor Pertanahan untuk mencegah terjadinya sengketa Hak Milik atas tanah suatu hari.
- 2) Bagi Kantor Pertanahan Kota Samarinda, sebaiknya memberikan penyuluhan hukum tentang peralihan hak atas tanah karena jual beli ataupun karena perbuatan hukum lainnya kepada masyarakat Kota Samarinda agar masyarakat mengerti mengenai peralihan hak atas tanah karena jual beli ataupun karena perbuatan hukum lainnya dan untuk mengurangi terjadinya sengketa hak atas tanah antar warga yang didapatkan karena peralihan hak atas tanah.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

Adrian Sutedi, 2008, *Peralihan Hak Milik Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar grafika, Jakarta.

Boedi Harsono, 1995, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

-----, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, (Hukum Tanah Nasional)*, Jakarta.

Eddy Ruchiyat, 2004, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung.

Herman Kermit, 2004, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*, Mandar Maju, Bandung.

R. Soeprapto, 1976, *Undang-Undang Dalam Praktek*, Mitra Sari, Jakarta.

S. Chandra, 2005, *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Persyaratan Permohonan Di KantorPertanahan*, Grasindo, Jakarta.

Soerjana dan Abdurrahman, 2003, *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekamto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press)*, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Urip Santoro, 2007, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta.

-----, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Memiliki Hak Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta
Tanah.

